

ETHICS

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Musri, S.Sos.,M.AP

Rizki Afri Mulia, S.Sos.,M.AP

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Biografi Penulis



Musri dilahirkan di Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 1 Desember 1965. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kampung Duri RT RT 2 RW 4 Kelurahan Kapala Koto Kecamatan Pauh Kota Padang, Sumatera Barat. Pendidikan Sarjana ditempuh di Universitas Ekasakti pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2015, diterima di Program Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, dan menamatkan pada tahun 2017.

Musri, S.Sos.,M.AP adalah dosen di Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ekasakti, Kota Padang Sumatera Barat. Bidang keahlian adalah Administrasi Perpajakan, Etika Administrasi dan Kepegawaian Negara.



Rizki Afri Mulia dilahirkan di Kota Padang pada tanggal 8 Februari 1987 sebagai anak ke-1 dari tiga bersaudara dari pasangan Sabar dan Afni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kampung Marapak RT 03 RW 06 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat. Pendidikan Sarjana ditempuh di Universitas Negeri Padang pada tahun 2006, namun lulus pada tahun 2012 di Universitas Almuslim Bireuen, Aceh. Pada tahun 2015, diterima di Program Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, dan menamatkan pada tahun 2017.

Rizki Afri Mulia, S.Sos.,M.AP adalah dosen di Program Ilmu Administrasi Negara STISIP Imam Bonjol, Kota Padang Sumatera Barat. Bidang keahlian adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. Selain mengajar sebagai Dosen, penulis juga bekerja sebagai Manajer di KSPPS BMT Kota Padang.

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Musri, S.Sos.,M.AP
Rizki Afri Mulia, S.Sos.,M.AP



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis : Musri, S.Sos.,M.AP
Rizki Afri Mulia, S.Sos.,M.AP

Desain Sampul : Nika Saputra, S.AP

Tata Letak : Nika Saputra, S.AP
Hikmah Millenia Saputri

ISBN : 978-623-5896-50-2

Diterbitkan Oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.



***Jangan Pernah Menyerah
Untuk Belajar, Karena
Nilai Tergantung Amal
dan Perbuatan***



KATA PENGANTAR

Administrasi adalah ilmu yang mempelajari negara serta kepentingan publik serta dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya. Birokrasi publik pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Tetapi faktanya, banyak birokrat pemerintah yang tidak memiliki kompetensi dan akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Birokrasi adalah lembaga yang paling banyak di sorot oleh masyarakat terkait dengan kinerja dan etika. Perhatian masyarakat ditujukan pada praktik yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini menunjukkan pentingnya etika dalam administrasi publik. Etika dan tingkah laku manusia saling berkaitan sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Buku ini bertujuan untuk membantu memberikan pengetahuan tentang pentingnya etika administrasi di Pemerintahan dan bagaimana praktik dalam birokrasi. Harapan penulis mudah-mudahan buku ini dapat memberikan bimbingan kepada pembaca bagaimana meningkatkan etika dalam birokrasi. Keterbatasan penulis memungkinkan kurang sempurnanya buku ini. Oleh karena itu, demi penyempurnaan buku ini, penulis berharap adanya umpan balik.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1	1
A. Pengertian Etika	1
B. Sejarah Etika	3
C. Macam-Macam Etika	5
D. Pendekatan Etika Dalam Asministrasi Publik	10
E. Moral	17
F. Konsep Administrasi Publik	19
G. Asas-Asas Etis Administrasi Negara	22
BAB 2	25
A. Pengertian Birokrasi	25
B. Sejarah Munculnya Konsep Birokrasi	27
C. Karakteristik Birokrasi	29
D. Tipe Ideal Birokrasi	30
E. Etika Dalam Birokrasi	37
F. Pelaksanaan Etika Birokrasi	40
BAB 3	45
A. Pengertian Kebijakan Publik	45
B. Tujuan Kebijakan Publik	52
C. Etika Dalam Kebijakan Publik	54
D. Konsep Nilai, Sistem Nilai, Dan Nilai Sosial	61
BAB 4	64
A. Pelayanan Publik	64
B. Konsep Etika Pelayanan Publik	69
C. Dilema Dalam Beretika	74
D. Tanggung Jawab Etika Dasar	76
E. Etika Seorang Administrator	78
F. Faktor Pendukung Etika Pelayanan Publik	82
BAB 5	85
A. Etika Sedang Naik Daun	85
B. Beberapa Bidang Garapan Bagi Etika Terapan	88
C. Etika Terapan Dan Pendekatan Multidispliner	89

D. Pentingnya Kasuistik	89
E. Kode Etik Profesi	90
F. Etika Di Depan Ilmu Dan Teknologi	93
G. Metode Etika Terapan.....	97
BAB 6	101
A. Etika Organisasi Pemerintah.....	101
B. Dimensi Etika Dalam Organisasi	103
C. Etika Dalam Jabatan.....	113
D. Good Governance Sebagai Trend Global Etika Pemerintahan.....	116
BAB 7	122
A. Pengertian Patologi Birokrasi.....	122
B. Konsep Dan Bentuk Patologi Birokrasi	125
C. Regulasi Penanganan Perkara.....	126
D. Langkah-Langkah Dalam Meminimalisir Patologi Birokrasi	129
E. Birokrasi Yang Sehat	130
BAB 8	132
A. Pengertian Korupsi	132
B. Model-Model Korupsi.....	141
C. Sebab-Sebab Korupsi.....	145
D. Sejarah Korupsi Di Indonesia.....	152
E. Penyelesaian Kasus-Kasus Korupsi	156
F. Etika Administrasi Publik Dalam Studi Korupsi	157
DAFTAR PUSTAKA.....	163
TENTANG PENULIS.....	169

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Etika

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata latin yaitu *mores*, yang merupakan bentuk jamak” dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila.

K Bertens dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain.

Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibekukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang di sebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma atau aturan ini pada dasarnya, menyangkut baik-buruk perilaku manusia. Atau, etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku

BAB 2

ETIKA BIROKRASI

A. Pengertian Birokrasi

Jika mendengar kata birokrasi, yang ada dalam benak pikiran bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit, dari meja satu ke meja lainnya, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal (*high cost*). Pendapat demikian tidak dapat disalahkan seluruhnya. Akan tetapi, apabila orang-orang yang duduk di belakang meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, birokrasi akan berjalan lancar dan "biaya tinggi" akan dapat dihindarkan. Untuk mengeliminasi pemikiran yang demikian, mari sejenak mencerna pendapat para ahli mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi.

1. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, *bureaucracy*, berasal dari kata *bureau* (berarti meja) dan *cratin* (berarti kekuasaan), artinya kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Di Indonesia, birokrasi cenderung dikonotasikan sebagaimana telah digambarkan seperti di atas.
2. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995), birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, dan inilah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.

BAB 3

ETIKA KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pengertian Kebijakan Publik

Berbicara kebijakan publik tidak terlepas dari masalah publik. Masalah publik adalah masalah yang berdampak luas pada kehidupan publik yang terus meningkat dan beragam sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat serta membutuhkan penanganan yang cepat dan akurat oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan publik merupakan agenda kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah yang merupakan tanggapan terhadap masalah-masalah publik. Dalam perumusan kebijakan, pemerintah harus memperhatikan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan dapat diterima semua pihak. Jadi dalam menyelesaikan masalah publik yang sangat terpenting adalah hubungan normatif antara pejabat publik dengan masyarakatnya, yang berarti bahwa pejabat publik harus memahami kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.

Kumorotomo (1999) membahas ukuran-ukuran normatif yang terdapat dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara atau administrasi negara dengan masyarakat umum serta bagaimana seharusnya kebijakan publik itu dilaksanakan. Adapun ukuran normatif tersebut adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan umum, moral individu dan moral kelompok serta pertanggung jawaban administrasi dan analisis etis.

BAB 4

ETIKA PELAYANAN PUBLIK

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010).

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan publik diantaranya adalah Agung Kurniawan (2005), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya

BAB 5

MASALAH- MASALAH ETIKA TERAPAN

A. Etika Sedang Naik Daun

Jika dipandang pada skala dunia, selama kira-kira lima dasawarsa terakhir ini wajah filsafat moral berubah cukup radikal. Tidak bisa disangkal, dalam situasi kita sekarang ini etika sedang naik daun. Hal itu terutama tampak dengan penampilannya sebagai etika terapan (*applied ethics*), kadangkand juga disebut filsafat terapan (*applied philosophy*). Pada awal abad ke-20 etika dipraktikkan sebagai “*metaetika*”

Bagi *metaetika* pertanyaan pokok adalah: apa yang kita maksudkan, jika suatu perbuatan disebut baik atau buruk? Apa artinya kategori-kategori seperti “Baik”, “Buruk”, “Layak” dan sebagainya, bila dipakai dalam konteks etis? Kiranya sudah jelas, dengan pendekatan seperti itu mereka justru menjauhi aktualisasi di bidang moral. Pertama, perkembangan pesat di bidang ilmu dan teknologi menimbulkan banyak persoalan etis yang besar, khususnya dalam sektor ilmu-ilmu biomedis. Sebentar lagi dalam pasal 6 kita kembali pada faktor pertama ini. Kedua, dalam masyarakat tahun 1960-an tercipta semacam “Iklim moral” yang seolah-olah mengundang minat baru untuk etika.

Di Amerika Serikat pada waktu itu berlangsung puncak perjuangan *civil rights* (hak-hak warga negara), khususnya persamaan hak bagi golongan kulit hitam. Mulai di dunia Barat (Tapi tidak terbatas di situ) waktu itu terlihat gerakan kuat yang menuntut persamaan hak wanita. Pada akhir tahun 1960-an dan permulaan 1970-an terjadi juga “revolusi mahasiswa” di beberapa negara Barat, dengan salah satu puncaknya di Prancis

BAB 6

ETIKA DALAM GOOD GOVERNANCE

A. Etika Organisasi Pemerintah

Konsepsi etika, sebenarnya sudah lama diterima sebagai suatu sistem nilai yang tumbuh dan berkembang pada peradaban manusia, sehingga dengan demikian pada dasarnya etika berkenaan dengan serangkaian upaya yang menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dalam tatanan kehidupan yang kolektif. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral.

Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, yang tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari. Secara umum, tugas pokok pemerintahan mencakup 7 bidang pelayanan, akan tetapi dapat lebih difokuskan lagi menjadi 3 fungsi yang utama, yaitu: Pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*empowerment* dan pembangunan (*Development*). Dipandang dari sudut etika, keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, haruslah dapat diukur dari ketiga fungsi utama

BAB

7

PATOLOGI BIROKRASI

A. Pengertian Patologi Birokrasi

Secara etimologis, kata “patologi” berasal dari kata *Pathos* yang berarti penderitaan/penyakit dan *Logos* yang berarti berbicara tentang ilmu. Jadi, patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit. Maksud dari pengertian di atas bahwa patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang asal usul dan sifat-sifatnya penyakit. Konsep ini bermula dari pengertian penyakit di bidang ilmu kedokteran dan biologi yang kemudian diberlakukan pula untuk masyarakat, karena masyarakat itu tidak ada bedanya dengan organisme atau biologi sehingga dalam masyarakat pun dikenal dengan konsep penyakit, Pengertian birokrasi, birokrasi berasal dari kata *bureaucracy* (bahasa inggris *bureau + cracy*), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas. Dalam organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.

Berbagai definisi birokrat dalam kamus besar bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai: Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan cara bekerja atau

BAB

8

KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktik korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno. (Nasir, 2006)

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul "*Arthashastra*" yang membahas masalah korupsi di masa itu. Dalam literatur Islam (Fawa'id & Huda, 2006), pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi. (Azhar, 2003)

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alatas, S. H., & (Usman.), A. G. (1982). *Sosiologi korupsi: sebuah penjelajahan dengan data kontemporer*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Allchin, D. (1999). Teaching Darwin Seriously: addressing evolution & ethics. *The American Biology Teacher*, 61(5), 350–355.
- Amin, A. (1975). *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang.
- Anderson, J. E. (1979). On the measurement of welfare cost under uncertainty. *Southern Economic Journal*, 1160–1171.
- Andvig, J. C., Fjeldstad, O.-H., Amundsen, I., & Søreide, T. (2000). *Research on Corruption A policy oriented survey*.
- Anwar, S. (2006). *Fikih anti korupsi perspektif ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Azhar, M. (2003). *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama Untuk Antikorupsi.
- Bagir, H. (2005). *Buku Saku Filsafat Islam*. Mizan.
- Baswir, R. (2002). Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktural. *Jurnal Universitas Paramadina*, 2(1), 25–34.
- Bertens, K. (1993). *Etika (Edisi 1)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, Kees. (2000). *Pengantar etika bisnis*. Kanisius.
- Blau, P. M. (1956). *Bureaucracy in Modern Society: With a Foreword by Charles H. Page*. Random House.

- Denhardt, K. G. (1988). *The ethics of public service: Resolving moral dilemmas in public organizations* (Issue 195). Greenwood Publishing Group.
- Devos, H. (1987). *Pengantar etika*.
- Dunn, W. N. (1998). *The experimenting society: Essays in honor of Donald T. Campbell* (Vol. 11). Transaction Publishers.
- Dwidjowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. UGM PRESS.
- Dye, T. R. (1975). Population density and social pathology. *Urban Affairs Quarterly*, 11(2), 265–275.
- Fadillah, P. (2001). *Paradigma kritis dalam studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Fawa'id, A., & Huda, S. (2006). *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Fox, T. C. (1994). Abortion, Morality and the Murky Middle: A Challenge to the Media. *Bioethics Forum*.
- Frankena, W. K. (1973). The ethics of love conceived as an ethics of virtue. *The Journal of Religious Ethics*, 21–36.
- Frederickson, H. G., & Rohr, J. A. (2015). *Ethics and public administration*. Routledge.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and His Government*. New York:

Mcgraw – Hill.

- Happy, M. (2000). Pengetahuan Kepariwisata. *Bandung: Alfabeta.*
- Harty, M. K. (1977). Building research from a clinical base: Problems and possibilities. *Bulletin of the Menninger Clinic, 41(1), 61.*
- Hatch, M. J., & Schultz, M. (2004). *Organizational identity: A reader.* Oxford University Press on Demand.
- Ismani, H. P. (2001). Etika Birokrasi. *Jurnal Administrasi Negara, 2.*
- Kant, I. (1949). *The philosophy of Kant: Immanuel Kant's moral and political writings.*
- Keban, Y. T. (2001). Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia. *Majalah Perencanaan Pembangunan, 1-10.*
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup.* Penerbit Buku Kompas.
- Keraf, A. S., & Imam, R. H. (1995). *Etika bisnis: membangun citra bisnis sebagai profesi luhur.*
- Korupsi, K. P. (2006). Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. *Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- Kumorotomo, W. (1999). *Ethics State Administration.* PT. Raja Grafindo Persada, JaNarta.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik.* Pembaruan.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (2017). *Power And Society: A Framework for Political inquiry.* Routledge.
- Leto, V., Rusmiwari, S., & Rohman, A. (2021). *Pengaruh Etika Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Di Desa*

Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang.

- Manan, I. (1989). *Entrepreneurship dan Corak Ekonomi Minangkabau Dalam Dunia Usaha*.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Bandung*.
- Muhafidin, H. D., SIP, M. S., Yadiman, H., & SH, M. H. (2020). *Etika Administrasi Publik: Edisi Revisi*. Penerbit Andi.
- Muhaimin, Y. (1991). *Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI*. Jakarta: ICMI.
- Mustafa, D. (2012). Etika Birokrasi dan Kultur Masyarakat di Indonesia. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 1(1), 99-113.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nasir, R. (2006). *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus umum bahasa indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poespoprodjo, W. (1988). *Filsafat moral: kesusilaan dalam teori dan praktek*. Remadja Karya.
- Ratminto, A. S. W., & Septi, A. (2005). *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Salam, B. (2000). *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shafritz, J., Russell, E. W., Borick, C., & Hyde, A. (2016). *Introducing public administration*. Routledge.
- Siagian, S. P. (1994). *Patalogi Birokrasi*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Simon, S. (1973). Values and teaching. *Religious Education*, 68(2), 183–194.
- Sinambela, L. P. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi Cet. V*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Soegiono, T. (2012). *Filsafat Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemowinoto, S. (2008). *Pengantar filsafat ilmu keperawatan*.
- Steinberg, S., & Austern, D. T. (1998). *Government, Ethics, and Managers: Penyelewengan Aparat Pemerintahan*, Rosda Jayaputra. Jakarta.
- Suharto, E. (2006). *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutopo, S. (2001). *Analisa Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara.
- Syafii, I. K. (2006). *Pengantar ilmu komunikasi*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafiie, I. K. (2004). *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Mandar Maju.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Pengantar administrasi pembangunan*.
- Wahab, S. A. (1997). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit FIA

UNIBRAW Dan IKIP Malang.

Wallis, M. (1989). *Bureaucracy and rural development.*

Widodo, J. (2010). Analisis kebijakan publik. *Malang: Bayumedia.*

Winarno, B. (2014). Kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus (cetakan kedua). *Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS.*

TENTANG PENULIS

Musri, S.Sos.,M.AP.



Musri dilahirkan di Gurun Panjang Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 1 Desember 1965. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kampung Duri RT RT 2 RW 4 Kelurahan Kapala Koto Kecamatan Pauh Kota Padang, Sumatera Barat. Pendidikan Sarjana ditempuh di Universitas Ekasakti pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2015, diterima di Program Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, dan menamatkan pada tahun 2017.

Musri, S.Sos.,M.AP adalah dosen di Program Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ekasakti, Kota Padang Sumatera Barat. Bidang keahlian adalah Administrasi Perpajakan, Etika Administrasi dan Kepegawaian Negara.

Rizki Afri Mulia, S.Sos., M.AP.



Rizki Afri Mulia dilahirkan di Kota Padang pada tanggal 8 Februari 1987 sebagai anak ke-1 dari tiga bersaudara dari pasangan Sabar dan Afni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kampung Marapak RT 03 RW 06 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat. Pendidikan Sarjana ditempuh di Universitas Negeri Padang pada tahun 2006, namun lulus pada tahun 2012 di Universitas Almuslim Bireuen, Aceh. Pada tahun 2015, diterima di Program Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, dan menamatkan pada tahun 2017.

Rizki Afri Mulia, S.Sos.,M.AP adalah dosen di Program Ilmu Administrasi Negara STISIP Imam Bonjol, Kota Padang Sumatera Barat. Bidang keahlian adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. Selain mengajar sebagai Dosen, penulis juga bekerja sebagai Manajer di KSPPS BMT Kota Padang.